

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam pandangan Wajib Pajak UMKM dan akademisi di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan disertai wawancara semi terstruktur kepada 4 narasumber wajib pajak UMKM dan 4 narasumber akademisi. Data yang diperoleh dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut wajib pajak terfokus pada *exchange fairness*, *administrative fairness*, dan *personal fairness* sementara itu aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut akademisi lebih terfokus pada *general fairness* dan *administrative fairness*.

Kata kunci: Keadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013



ABSTRACT

This research was aimed to perceive the fairness aspects of implementation Government Regulation No. 46 of 2013 in point of view the small, micro, and medium enterprises taxpayer and academics in Bandung City.

This research used qualitative method with techniques of data collection through library research and field research along with semi structure interview to 4 small, micro, and medium enterprises taxpayer interviewees and 4 academics interviewees. The data obtained is analyzed through data reduction, data display, and then the conclusion drawing/verification.

Based on analysis obtained the following results: the aspect of fairness on Government Regulation No. 46 of 2013 application in point of view the small, micro, and medium enterprises taxpayer focused on exchange fairness, administrative fairness, and personal fairness, meanwhile the aspect of fairness on Government Regulation No. 46 of 2013 application in point of view the academics more focused on general fairness and administrative fairness.

Keywords: *Fairness, Government Regulation No. 46 of 2013*



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENYATAAN

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Fokus Penelitian 13

1.3 Rumusan Masalah 13

1.4 Tujuan Penelitian..... 14

1.5 Manfaat Penelitian..... 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Keadilan..... 16

2.2 Teori Keadilan.....	17
2.2.1 <i>Equity Theory</i>	17
2.2.2 <i>Distributive Justice Theory</i>	19
2.2.3 <i>Procedural Justice Theory</i>	23
2.2.4 <i>Social Justice Theory</i>	24
2.3 Teori Pemungutan Pajak	26
2.4 Prinsip Pemungutan Pajak.....	30
2.4.1 <i>Equality/Equity</i>	30
2.4.2 <i>Certainty</i>	34
2.4.3 <i>Convenience of Payment</i>	35
2.4.4 <i>Low Cost of Collection</i>	36
2.4.5 <i>Revenue Productivity</i>	40
2.5 Pendekatan Pajak	41
2.6 Dimensi Keadilan.....	47
2.6.1 <i>General Fairness</i>	50
2.6.2 <i>Exchange Fairness</i>	51
2.6.3 <i>Horizontal Fairness</i>	52
2.6.4 <i>Vertical Fairness</i>	53
2.6.5 <i>Reributive Fairness</i>	54
2.6.6 <i>Personal Fairness</i>	56
2.6.7 <i>Administrative Fairness</i>	57
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	58
2.7.1 Kriteria Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu.....	59

2.7.2 Dasar Perhitungan dan Pengenaan Tarif.....	60
2.8 Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	61
2.8.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	61
2.8.2 Pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	62
2.9 Akademisi.....	62
2.10 Penelitian Terdahulu.....	63
2.11 Kerangka Teoritis.....	69
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	74
3.2 Populasi dan Sampel	76
3.3 Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	78
3.4 Instrumen Penelitian.....	79
3.5. Konsep Penelitian.....	80
3.6 Teknik Analisis Data.....	81
3.7 Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	82
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Aspek Keadilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor	
46 Tahun 2013 dalam Pandangan Wajib Pajak.....	88
4.1.1 <i>General Fairness</i>	89
4.1.2 <i>Exchange Fairness</i>	91
4.1.3 <i>Horizontal Fairness</i>	93

4.1.4 <i>Vertical Fairness</i>	94
4.1.5 <i>Retributive Fairness</i>	97
4.1.6 <i>Personal Fairness</i>	100
4.1.7 <i>Administrative Fairness</i>	101
4.2 Analisis Aspek Keadilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam Pandangan Akademisi.....	105
4.2.1 <i>General Fairness</i>	106
4.2.2 <i>Exchange Fairness</i>	112
4.2.3 <i>Horizontal Fairness</i>	115
4.2.4 <i>Vertical Fairness</i>	117
4.2.5 <i>Retributive Fairness</i>	120
4.2.6 <i>Personal Fairness</i>	123
4.2.7 <i>Administrative Fairness</i>	126
4.3 Analisis Hal-Hal Yang Dinilai Menghambat Dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	131
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	135
5.2 Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Tabel Penerimaan Negara	3
Tabel 1.2	: Tabel Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Potensi Penerimaan Pajak dari UMKM	5
Tabel 1.3	: Tabel Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.....	7
Tabel 2.1	:Tabel Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	61
Tabel 2.2	: Tabel Penelitian Terdahulu.....	67
Tabel 3.1	: Tabel Konsep Penelitian.....	81
Tabel 4.1	: Tabel Informasi Narasumber Wajib Pajak.....	88
Tabel 4.2	: Tabel Informasi Narasumber Akademisi.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Teoritis.....	72
Gambar 3.1	: Situasi Sosial	76
Gambar 3.2	: Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif	83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A : Pedoman Wawancara
- Lampiran B : Hasil Wawancara Wajib Pajak UMKM
- Lampiran C : Hasil Wawancara Wajib Pajak Akademisi
- Lampiran D : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Lampiran E : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Berdasarkan Peredaran Bruto Tertentu.
- Lampiran F : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemptongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasialn Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Lampiran G : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/ 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Lampiran H : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Lampiran I : Surat Izin Penelitian dan Pengumpulan Data

Lampiran J : Surat Pemberian Izin Riset dan Nota Dinas Pemberitahuan Pemberian Izin Riset